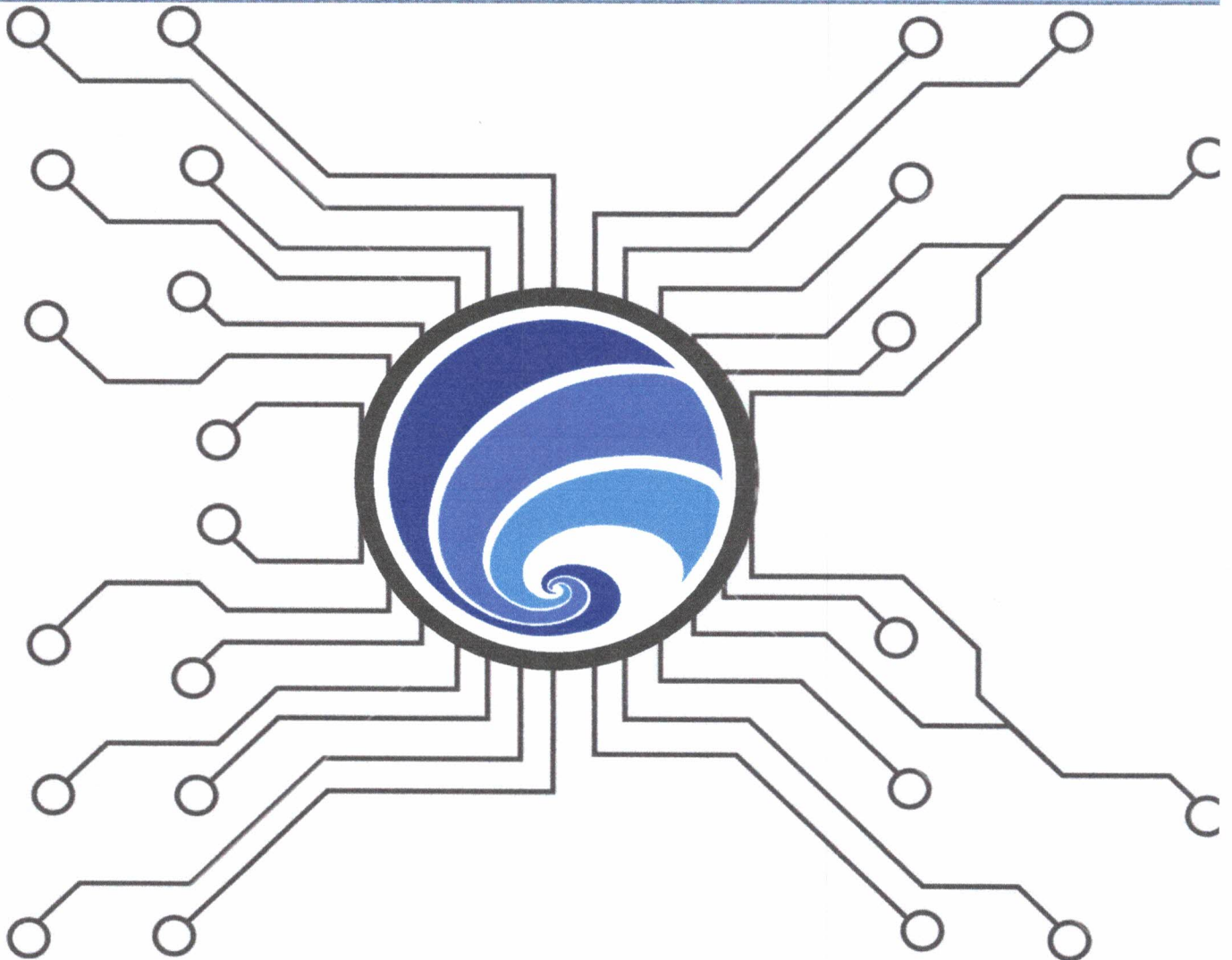




**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**RANCANA KERJA
RENJA - 2026**



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun pertama dari Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2025 - 2029 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang ingin dicapai.

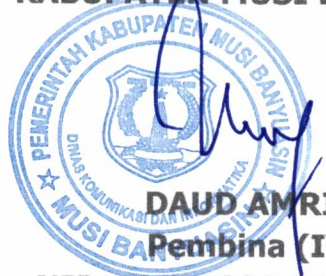
Program Kegiatan pada RENJA 2026 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA tahun ke-1 dengan tetap sehingga disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2025 - 2029 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Penutup.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja PD tahun 2026 diharapkan dapat memberikan

informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



DAUD AMRI, S.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19751229 200312 1 005

DAFTAR ISI

SK PENETAPAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud Dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD...	34
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	50
3.3 Program dan Kegiatan	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	60
BAB V PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

TABEL T-C 29.....	20
T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2023.....	20
TABEL T-C. 30.....	33
T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	33
TABEL T-C. 31.....	40
T-C. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	40
TABEL T-C. 32.....	45
T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....	45
TABEL T-C 3.3.....	51
T 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2024 dan Prakiraan Maju 2025.....	51
TABEL T-C 4.1.....	60
T-C 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan PD	60
TABEL T-C 4.2.....	64
T-C 4.1 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).....	64



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 254 Sekayu 30711 Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
Telp (0714) 321202 Fax. (0714) 321202 e-mail : dinkominfo@mubakab.go.id
Website : www.dinkominfo.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 101 /KPTS-DINKOMINFO/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Musi banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 276 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 terdiri dari pejabat di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara

penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja 2026.

- KEEMPAT : Bilamana ada ketentuan tambahan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal 21 Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



DAUD AMRI, S.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19751229 200312 1 005

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 101 /KPTS-DINKOMINFO/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

Jabatan dalam Tim	Nama / Jabatan
Penanggungjawab	: Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin
Ketua	: Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin
Anggota	: 1. Kepala Bidang Persandian 2. Kepala Bidang Statistik 3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika 4. Kepala Bidang Informasi Publik 5. Kepala Bidang Komunikasi Publik 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian 7. Perencana Ahli Pertama

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



DAUD AMRI,S.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19751229 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kol. Wahid Udin LK. VII Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711

Musi Banyuasin Sumatera Selatan

Website : www.mubakab.go.id, e-mail : kominfomuba@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nomor : 102 /KPTS-DINKOMINFO/2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rencana kerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
- b. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 276 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Musi Banyuasin Tahun 2026;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- b. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

- l. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- n. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- o. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33);
- p. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025-2045;
- q. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026.

KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) DINKOMINFO Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2026.

- KEDUA : Renja-PD DINKOMINFO memuat Tujuan, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan kurun waktu satu tahunan yaitu tahun 2026.
- KETIGA : Renja-PD DINKOMINFO 2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT : Renstra DINKOMINFO Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja tahunan DINKOMINFO yang disebut Renja-PD DINKOMINFO.
- KELIMA : Kepala DINKOMINFO melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra DINKOMINFO Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Renja DINKOMINFO.
- KEENAM : Kepala DINKOMINFO mengevaluasi capaian pelaksanaan Renja DINKOMINFO.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada tanggal : 21 oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



DAUD AMRI, S.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19751229 200312 1 005

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 - 2029. Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya dengan mengambil rencana atau program dari Renstra, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

1.1.1 Pengertian Renja PD

Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen perencanaan yang dilaksanakan periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana fungsi Renja melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan PD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program PD secara keseluruhan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja PD

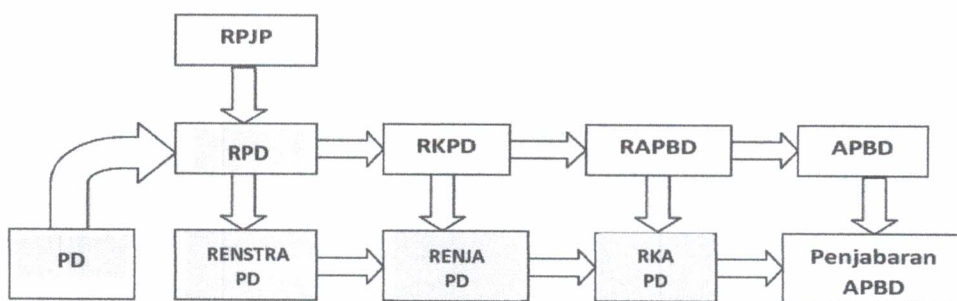
Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun sebelumnya akan sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

1.1.3 Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen RKPD

- Renja menjabarkan dan memuat isi RKPD dan isi Renja harus sinkron dengan RKPD, seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1.3

Alur Perencanaan Pembangunan Daerah



1.1.4 Keterkaitan Renja PD dengan Renstra PD

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang disinkronisasi dengan RKPD. Renja Perangkat Daerah memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJMD dan RPJPD. Sebaliknya Renja

Perangkat Daerah dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, KUAPPAS dan RAPBD.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
2. Rencana Kerja (Renja) PD dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan.

1.1.5 Keterkaitan Renja PD dengan Renja Provinsi

Renja PD mendukung kebijakan Renja Provinsi, kebijakan yang ditetapkan provinsi akan diikuti oleh Kabupaten/Kota. Sehingga tercipta sinergisitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.

1.1.6 Keterkaitan Renja PD dengan K/L

Renja PD mendukung kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika, kebijakan yang ditetapkan Kementerian akan diikuti oleh Kabupaten/Kota. Sehingga tercipta sinergisitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian

1.1.7 Tindak Lanjut dengan Proses Penyusunan RAPBD

Pada tahun 2026 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan PD, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang ditetapkan. Dalam hal ini dilakukan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Tahun berjalan dan Renstra PD.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Daerah pada tahun berjalan.
3. Rencana Program dan kegiatan yang baru dalam Renja PD forum Musrenbang dan program program kegiatan yang diajukan oleh setiap bidang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dapat diusulkan melalui musrenbang dan reses DPRD dan usulan dari Bidang-bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dimuat dalam RKPD, dilanjutkan menjadi RAPBD dan disahkan menjadi program dan kegiatan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 046/219/Bangda tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Dinas Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 276 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

Maksud disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2026 adalah untuk menjadi Dokumen acuan Perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun dan menjadi arah Kebijakan perencanaan pembangunan Dinas Kominfo untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025-2045, Dengan Visi **"MAJU LEBIH CEPAT, BERSAMA MENYEJAHTERAKAN MUSI BANYUASIN"**.

1.3.2 Tujuan penyusunan Renja

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai Acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2026;
2. Sebagai dasar pokok pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan dari Renstra PD dan bahan tolak ukur untuk mencapai target dari Renstra Perangkat Daerah;
3. Sebagai bahan monitoring/evaluasi Rencana Kerja tahun 2026 ;
4. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- Pengertian Renja PD
- Proses Penyusunan Renja PD
- Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen RKPD
- Keterkaitan Renja PD dengan Renstra PD

- Keterkaitan Renja PD dengan Renstra Provinsi
 - Keterkaitan Renja PD dengan Renja K/L
 - Tindak Lanjut dengan proses penyusunan RAPBD
- 1.2 Landasan Hukum
- UU, PP, Perda, Peraturan Perundangan lainnya tentang SOTK, kewenangan PD serta pedoman yang jadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran.
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- Maksud Penyusunan Renja
 - Tujuan Penyusunan Renja
- 1.4 Sistematika Penulisan
- Pokok Bahasan dalam penulisan Renja dan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD
- Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Tahun lalu (2024) dan Prakiraan capaian tahun 2025.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- Program Kegiatan yang dapat mendukung tercapainya indikator kinerja
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- Hal kritis terkait pelayanan PD
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- Tabel Reviu terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

- Telaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait tugas pokok dan fungsi PD

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

- Isu Penyelenggaraan Tupoksi PD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- Tabel Rencana Kerja dan pendanaan PD

BAB V PENUTUP

- Kaidah-kaidah pelaksanaannya

B A B II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

- Evaluasi Pelaksanaan Renja pada tahun lalu

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mempunyai tugas Melaksanakan tiga urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian serta Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas yaitu :

1. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin No. 276 Tahun 2021 ;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada dinas komunikasi dan informatika;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;

- f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian;
- h. Penyelenggara kesekretariatan dinas komunikasi dan informatika;
- i. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang komunikasi dan informatika;
- j. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pada tahun 2024 pagu anggaran realisasi belanja sebesar Rp. 30.531.300.719,00 dengan tingkat realisasi fisik 98,32% dan realisasi Keuangan 68,01% atau Rp. 20.764.284.583,00-.

Sedangkan pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika hanya melaksanakan 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian dengan menyelenggarakan 5 program dan 12 kegiatan antara lain :

a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

Anggaran	: Rp. 49.360.000
Realisasi Fisik	: 100 %
Realisasi Keuangan	: 71,05 %

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik

Anggaran : Rp. 377.268.000

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi Keuangan : 74,06 %

- Pelayanan Informasi Publik

Anggaran : Rp. 401.114.450

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi Keuangan : 62,03 %

- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah

Anggaran : Rp. 188.506.700

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi Keuangan : 56,56 %

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Anggaran : Rp. 6.684.071.256

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi Keuangan : 35,35%

- Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Anggaran : Rp. 529.100.362

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi Keuangan : 53,49%

- Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Anggaran : Rp. 202.565.100

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi Keuangan : 33,64 %

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/kota

- Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Anggaran : Rp. 139.403.400

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi Keuangan : 39,24 %

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Anggaran : Rp. 477.708.522

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi Keuangan : 25,83%

- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah

Anggaran : Rp. 630.975.446

Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi Keuangan : 66,29 %

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya
Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
Anggaran : Rp. 330.421.500
Realisasi Fisik : 100 %
Realisasi Keuangan : 14,39%

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah
Kabupaten/kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik
Anggaran : Rp. 627.016.200
Realisasi Fisik : 100 %
Realisasi Keuangan : 14,29 %

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/kota
Anggaran : Rp. 841.065.543
Realisasi Fisik : 100 %
Realisasi Keuangan : 5,57 %

b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Anggaran : Rp. 37.880.000
Realisasi Fisik : 100 %
Realisasi Keuangan : 90,38 %

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD.

Anggaran : Rp. 24.180.000
Realisasi Fisik : 100 %
Realisasi Keuangan : 83,96 %

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Anggaran : Rp. 5.015.645.999
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : 85,93 %

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Anggaran : Rp. 106.295.000
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : 82,07%

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Anggaran : Rp. 29.152.000
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : 97,54 %
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Anggaran : Rp. 551.070.000
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : 99,26 %
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Anggaran : Rp. 49.929.465
- Realisasi Fisik : 100 %

Realisasi Keuangan : 100 %

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Anggaran : Rp. 239.164.950
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : 95,67 %

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Anggaran : Rp. 119.670.250
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : 96,42%

- Penyediaan Bahan/material
 - Anggaran : Rp. 39.712.470
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : 99,28 %

- Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Anggaran : Rp. 35.000.000
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : 99,21 %

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Anggaran : Rp. 318.631.225
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : 92,52 %

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Mebel
 - Anggaran : Rp. 100.422.000

Realisasi Fisik : 100 %
Realisasi Keuangan : 99,89 %

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran : Rp. 400.800.544
Realisasi Fisik : 100 %
Realisasi Keuangan : 99,97 %
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran : Rp. 1.695.943.416
Realisasi Fisik : 100 %
Realisasi Keuangan : 93,06 %
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Anggaran : Rp. 253.061.019
Realisasi Fisik : 100 %
Realisasi Keuangan : 83,22 %
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Anggaran : Rp. 107.520.000
Realisasi Fisik : 100 %
Realisasi Keuangan : 99,73 %

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - Anggaran : Rp. 773.644.699
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : 89,5 %

- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Anggaran : Rp. 705.551.675
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : 89,53 %

- Layanan Hubungan Media
 - Anggaran : Rp. 5.929.925.000
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : 83,23 %

- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas
 - Anggaran : Rp. 40.994.750
 - Realisasi Fisik : 100 %
 - Realisasi Keuangan : 86,26 %

- c. Realisasi Prog/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - Tidak ada Prog/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

- d. Faktor Penyebab Tidak Tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja
 - Secara teknis semua kegiatan telah terlaksana dengan baik, namun anggaran tidak terealisasi dikarenakan adanya Defisit Anggaran

- Implikasi yang Timbul terhadap target capaian Program renstra PD
 - Secara teknis semua kegiatan telah terlaksana dengan baik.
- Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi Faktor Penyebab
 - Penyusunan Anggaran yang Lebih Fleksibel dan Responsif

B. Prakiraan capaian tahun berjalan

Pada tahun 2024 rencana kerja dinkominfo untuk belanja Wajib sebesar Rp. 31.177.116.328,00 dengan realisasi fisik s.d Juni 2024 sebesar 47,59% dan realisasi Keuangan s.d Juni 2023 sebesar 32,44% atau Rp. 10.114.605.890,00

Pada tahun 2024, Dinkominfo melaksanakan 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk lebih jelas mengenai realisasi pencapaian anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba dapat disajikan pada tabel T-C.29.

TABEL T-C 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi %	Target	T (Rp)	Realisasi	R (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.18	Dinas Komunikasi Dan Informatika								27.520.943.902,70		14.598.419.936,00	
1.16.2.16.18.1.16.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase terlaksananya urusan penunjang pemerintah Daerah							8.747.738.909,90		5.289.049.742,00	
1.16.2.16.18.1.16.1.02.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sistem perencanaan dan Evaluasi Kinerja berjalan dengan baik	10 Laporan	10 Laporan					67.421.500,00		36.554.400,00	
1.16.2.16.18.1.16.1.02.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan		2 Dokumen	25.860.000,00	18.804.000,00	
1.16.2.16.18.1.16.1.02.01.02.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Output	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan		4 Laporan	16.560.000,00	8.004.000,00	
1.16.2.16.18.1.16.1.02.01.02.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Output	Jumlah Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	25.001.500,00	9.746.400,00	
1.16.2.16.18.1.16.1.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kelancaran Administrasi Perkantoran							5.632.046.736,00		3.695.074.392,00	
1.16.2.16.18.1.16.1.02.02.02.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	60 Orang	60 Orang		43 Orang	5.632.046.736,00	3.695.074.392,00	
1.16.2.16.18.1.16.1.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas							94.855.000,00		132.335.600,00	
1.16.2.16.18.1.16.1.02.05.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Output	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	38 Paket							
1.16.2.16.18.1.16.1.02.05.02.05.09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Output	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	32 Orang 2 Orang	32 Orang 2 Orang		9 Orang	94.855.000,00	106.295.000,00	
1.16.2.16.18.1.16.1.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelancaran Aktivitas Kerja dan Perkantoran							502.867.152,90		502.867.152,90	
1.16.2.16.18.1.16.1.02.06.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Output	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18 Jenis	18 Jenis		1 Paket	30.000.427,00	30.000.427,00	

KODE	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi %	Target	T (Rp)	Realisasi	R (Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.16.2.16.18.1.16. 1.02.06.02.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Output	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18 Jenis	18 Jenis		1 Paket	120.489.989,40		120.489.989,40	
1.16.2.16.18.1.16. 1.02.06.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20 Jenis	20 Jenis						
1.16.2.16.18.1.16. 1.02.06.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	37 Jenis	37 Jenis		1 Paket	112.000.000,00		99.925.830,00	
1.16.2.16.18.1.16. 1.02.06.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Jenis	3 Jenis		2 Paket	54.626.236,50		54.510.855,00	
1.16.2.16.18.1.16. 1.02.06.02.06.07	Penyediaan Bahan/material	Output	Jumlah Paket Bahan/material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	40.000.000,00		0	
1.16.2.16.18.1.16. 1.02.06.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Output	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	1200 Kotak	1200 Kotak		1 Laporan	50.400.000,00		22.500.000,00	
1.16.2.16.18.1.16. 1.02.06.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	60 Laporan 52 Laporan 1200 Kotak	60 Laporan 52 Laporan 1200 Kotak		2 Laporan	95.350.500,00		84.657.991,00	
1.16.2.16.18.1.16. 1.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan meubeler penunjang kenyamanan bekerja								47.118.834,00		0	
1.16.2.16.18.1.16. 1.02.07.02.07.05	Pengadaan Mebel	Output	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	-	-		7 Unit	47.118.834,00		0	
1.16.2.16.18.1.16. 1.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah								1.684.248.437,00		1.007.661.721,00	
1.16.2.16.18.1.16. 1.02.08.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan		2 Laporan	407.931.948,00		222.561.721,00	
1.16.2.16.18.1.16. 1.02.08.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	65 Orang 12 Bulan	65 Orang 12 Bulan		2 Laporan	1.276.316.489,00		785.100.000,00	
1.16.2.16.18.1.16. 1.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang kenyamanan bekerja								719.181.250,00		202.793.598,00	
1.16.2.16.18.1.16. 1.02.09.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Output	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	9 Unit 9 Unit	9 Unit 9 Unit		8 Unit	341.230.000,00		93.669.098,00	
1.16.2.16.18.1.16. 1.02.09.02.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1597.75 m2	1597.75 m2		1 unit	323.711.250,00		99.524.500,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025		Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi %	Target	T (Rp)	Realisasi	R (Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.16.2.16.18.1.16.1.02.09.02.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	57 Unit	57 Unit	2 Jenis	2 Jenis		64 Unit	54.240.000,00		9.600.000,00	
1.16.2.16.18.1.16.2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik								7.804.016.430,20		3.924.439.089,00	
1.16.2.16.18.1.16.2.02.01	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Media Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kab. Muba yang menyampaikan Informasi Kepada masyarakat								7.804.016.430,20		3.924.439.089,00	
1.16.2.16.18.1.16.2.02.01.02.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik	Output	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	9 unit 6 jenis 1 tahun	9 unit 6 jenis 1 tahun						
1.16.2.16.18.1.16.2.02.01.02.01.02	Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik	Output	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan						
1.16.2.16.18.1.16.2.02.01.02.01.04	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Output	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	240 Kali 1 kali	240 Kali 1 kali						
1.16.2.16.18.1.16.2.02.01.02.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Output	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	250 orang 3000 m2	250 orang 3000 m2						
1.16.2.16.18.1.16.2.02.01.02.01.07	Layanan Hubungan Media	Output	Jumlah Layanan Hubungan Media	150 Layanan	150 Layanan	116 Media	116 Media						
1.16.2.16.18.1.16.2.02.01.02.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi Di Daerah	Output	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Kasus 1 kasus	1 Kasus 1 kasus						
1.16.2.16.18.1.16.2.02.01.02.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	Output	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Kecamatan	4 Kecamatan						
1.16.2.16.18.1.16.2.02.01.02.01.16	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Output	Jumlah Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi						2 Laporan	166.962.250,00		14.177.600,00	
1.16.2.16.18.1.16.2.02.01.02.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Output	Jumlah Rekomendasi Komunikasi terhadap isu Publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah						3 Rekomendasi	643.829.000,00		205.517.474,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi %	Target	T (Rp)	Realisasi	R (Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.16.2.16.18.1.16.2.02.01.02.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Output	Jumlah Media komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis						150 Media	5.557.000.000,00		3.190.989.980,00	
1.16.2.16.18.1.16.2.02.01.02.01.22	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Output	Jumlah Strategi komunikasi Publik yang disusun						200 Dokumen	531.522.070,70		214.769.195,00	
1.16.2.16.18.1.16.2.02.01.02.01.23	Penyusunan Konten	Output	Jumlah Konten Informasi Publik						3 Konten	904.703.109,50		298.984.840,00	
1.16.2.16.18.1.16.3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten								8.650.449.091,50		4.541.828.651,00	
1.16.2.16.18.1.16.3.02.01	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Terpeliharanya Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten											
1.16.2.16.18.1.16.3.02.01.02.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Output	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit	12 bulan 12 bulan 7 jenis 2 jenis	12 bulan 12 bulan 7 jenis 2 jenis		48 Perangkat Daerah				
1.16.2.16.18.1.16.3.02.02	Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Pelayanan Pemerintah dan Masyarakat melalui Teknologi Informatika								8.650.449.091,50		4.541.828.651,00	
1.16.2.16.18.1.16.3.02.02.02.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Output	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan						
1.16.2.16.18.1.16.3.02.02.02.02.10	Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Output	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 kali 14 kecamatan	1 kali 14 kecamatan						
1.16.2.16.18.1.16.3.02.02.02.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Output	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 Domain Arsitektur dan Peta Rencana yang diusulkan						1 Dokumen	253.609.380,00		36.520.690,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi %	Target	T (Rp)	Realisasi	R (Rp)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.16.2.16.18.1.16. 3.02.02.02.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Output	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						48 Perangkat Daerah	8.275.531.711,50		4.494.994.961,00	
1.16.2.16.18.1.16. 3.02.02.02.02.27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Output	Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas						18 Program	121.308.000,00		10.313.000,00	
1.20.2.16.18.1.20. 2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data Statistik Sektoral								766.009.363,30		242.528.464,00	
1.20.2.16.18.1.20. 2.02.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/kota	Tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan.								766.009.363,30		242.528.464,00	
1.20.2.16.18.1.20. 2.02.01.02.01.01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Output	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	1 data 1 dokumen	1 data 1 dokumen						
1.20.2.16.18.1.20. 2.02.01.02.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Output	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	48 Orang	48 Orang	1 kegiatan	1 kegiatan						
1.20.2.16.18.1.20. 2.02.01.02.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah	Output	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen								
1.20.2.16.18.1.20. 2.02.01.02.01.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Output	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang Statistik						50 orang	250.947.863,30		118.145.558,00	
1.20.2.16.18.1.20. 2.02.01.02.01.08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Output	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan						100 Peserta	327.036.500,00		74.512.406,00	
1.20.2.16.18.1.20. 2.02.01.02.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Output	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi Metedeta						1 Dokumen	154.814.000,00		44.499.200,00	
1.20.2.16.18.1.20. 2.02.01.02.01.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Output	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta Rekomendasi dari Pembina Data Statistik						1 Dokumen	33.211.000,00		5.371.300,00	
1.21.2.16.18.1.21. 2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase keamanan Informasi Pemerintah Daerah								1.798.503.243,00		184.011.912,00	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi %	Target	T (Rp)	Realisasi	R (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.21.2.16.18.1.21. 2.02.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pembak Muba							1.798.503.243,00		184.011.912,00	
1.21.2.16.18.1.21. 2.02.01.02.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Output	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Kali	1 Kali		389.678.000,00		101.109.300,00	
1.21.2.16.18.1.21. 2.02.01.02.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	Output	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	2 jenis	2 jenis		825.480.200,50		492.504.564,00	
1.21.2.16.18.1.21. 2.02.01.02.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Output	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	48 Perangkat Daerah	48 Perangkat Daerah	-	-		337.571.907,50		6.960.126,00	

TABEL T-C 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN PERANGKAT DAERAH S/D BULAN AGUSTUS 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	NAMA KEGITAN / SUB KEGIATAN	DANA		NAMA KPA / PPK	METODE PENGADAAN	NAMA PELAKSANA/ REKANAN	MASA PELAKSANAAN KONTRAK/SPK		KEMAJUAN / REALISASI BULAN AGUSTUS			LOKASI
		ANGGARAN (Rp)	NILAI KONTRAK/SPK (Rp)						REALISASI FISIK	PENYERAPAN KEUANGAN		
							MULAI	SELESAI	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.16.18	Dinas Komunikasi Dan Informatika	27.520.943.902,70							66,68	14.598.419.936,00	53,04	
1.16.2.16.18.1.16.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.747.738.909,90							65,34	5.289.049.742,00	60,46	
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.421.500,00							82,58	36.554.400,00	54,22	
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.860.000,00		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				90	18.804.000,00	72,71	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.560.000,00		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				90	8.004.000,00	48,33	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.01.02.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	25.001.500,00		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				70	9.746.400,00	38,98	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.632.046.736,00							66,66	3.695.074.392,00	65,61	
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.02.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.632.046.736,00		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				66,66	3.695.074.392,00	65,61	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.855.000,00							100	57.000.000,00	60,09	
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.05.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94.855.000,00		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				100	57.000.000,00	60,09	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	502.867.152,90							64,51	289.965.631,00	57,66	
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.06.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.427,00	28.370.955,00	DAUD AMRI, S.H	E-Catalog/E-Purchasing	CV. ABDI BANGUN UTAMA	17/03/2025	14/04/2025	100	28.370.955,00	94,57	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.06.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.489.989,40		DAUD AMRI, S.H	E-Catalog/E-Purchasing				0	0	0	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.06.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.000.000,00	99.925.830,00	DAUD AMRI, S.H	E-Catalog/E-Purchasing	CV. DIAH KONICA MINOLTA	07/03/2025	30/06/2025	100	99.925.830,00	89,22	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.06.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.626.236,50	25.510.855,00	DAUD AMRI, S.H	E-Catalog/E-Purchasing	CV. ABDI BANGUN UTAMA	17/03/2025	30/06/2025	100	54.510.855,00	99,79	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.06.02.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00		DAUD AMRI, S.H	E-Catalog/E-Purchasing				0	0	0	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.06.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.400.000,00		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				70	22.500.000,00	44,64	Kecamatan Sekayu

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DANA		NAMA KPA / PPK	METODE PENGADAAN	NAMA PELAKSANA/ REKANAN	MASA PELAKSANAAN KONTRAK/SPK		KEMAJUAN / REALISASI BULAN AGUSTUS			LOKASI
		ANGGARAN (Rp)	NILAI KONTRAK/SPK (Rp)						REALISASI FISIK (%)	PENYERAPAN KEUANGAN		
							MULAI	SELESAI		(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.06.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.350.500,00		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				97	84.657.991,00	88,79	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.118.834,00							0	0	0	
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.07.02.07.05	Pengadaan Mebel	47.118.834,00		DAUD AMRI, S.H	E-Catalog/E-Purchasing				0	0	0	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.684.248.437,00							66,66	1.007.661.721,00	59,83	
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.08.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	407.931.948,00		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				66,66	222.561.721,00	54,56	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.08.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.276.316.489,00		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				66,66	785.100.000,00	61,51	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	719.181.250,00							50,55	202.793.598,00	28,2	
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.09.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	341.230.000,00		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				70,88	93.669.098,00	27,45	Kecamatan Sekayu
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	331.230.000,00		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				70	83.669.098,00	25,26	Kecamatan Sekayu
	2. Pembayaran gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan	10.000.000,00		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				100	10.000.000,00	100	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.09.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	323.711.250,00							30,89	99.524.500,00	30,74	
	1. Pemeliharaan Gedung Kantor	111.834.000,00		DAUD AMRI, S.H	E-Catalog/E-Purchasing				0	0	0	Kecamatan Sekayu
	2. Pemeliharaan Halaman Kantor	11.877.250,00		DAUD AMRI, S.H	E-Catalog/E-Purchasing				0	0	0	Kecamatan Sekayu
	3. Rehab Ringan Rumah Dinas Jabatan	200.000.000,00	199.049.000,00	DAUD AMRI, S.H	E-Catalog/E-Purchasing	CV. Sinar Karya	17/07/2025	14/09/2025	50	99.524.500,00	49,76	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.1.0 2.09.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.240.000,00		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				40	9.600.000,00	17,7	Kecamatan Sekayu

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DANA		NAMA KPA / PPK	METODE PENGADAAN	NAMA PELAKSANA/ REKANAN	MASA PELAKSANAAN KONTRAK/SPK		KEMAJUAN / REALISASI BULAN AGUSTUS			LOKASI
		ANGGARAN (Rp)	NILAI KONTRAK/SPK (Rp)						REALISASI FISIK (%)	PENYERAPAN KEUANGAN		
							MULAI	SELESAI		(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.16.2.16.18.1.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.804.016.430,20							64,83	3.924.439.089,00	50,29	
1.16.2.16.18.1.16.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.804.016.430,20							64,83	3.924.439.089,00	50,29	
1.16.2.16.18.1.16.2.02.01.02.01.16	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	166.962.250,00		FRANS GUSTIAN, S.T., M.Si	Swakelola				50	14.177.600,00	8,49	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.2.02.01.02.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	643.829.000,00							39,54	205.517.474,00	31,92	
	1. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	56.379.000,00		FRANS GUSTIAN, S.T., M.Si	Swakelola				60	18.167.474,00	32,22	Dalam Kab. Muba
	2. Belanja Jasa Konsultansi Omnichanel (Muba Fastrack dan SP4N LAPOR)	300.000.000,00		FRANS GUSTIAN, S.T., M.Si	E-Catalog/E-Purchasing				0	0	0	Kecamatan Sekayu
	3. Gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Emergency Call Centre System	49.950.000,00		FRANS GUSTIAN, S.T., M.Si	Swakelola				100	49.950.000,00	100	Kecamatan Sekayu
	4. Belanja Jasa Emergency Call Center System /NTPD112	200.000.000,00	149.850.000,00	FRANS GUSTIAN, S.T., M.Si	E-Catalog/E-Purchasing	PT. Digital Sandi Informasi	02/01/2025	31/12/2025	66,66	99.900.000,00	49,95	Kecamatan Sekayu
	5. Gagal bayar Tahun Anggaran 2024 Jasa Omnichanel Emergency Call Centre 112	37.500.000,00		FRANS GUSTIAN, S.T., M.Si	Swakelola				100	37.500.000,00	100	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.2.02.01.02.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.557.000.000,00		Achmad Kartiko Buwono, SE.,M.M	Swakelola				70	3.190.989.980,00	57,42	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.2.02.01.02.01.22	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	531.522.070,70		Achmad Kartiko Buwono, SE.,M.M	Swakelola				70	214.769.195,00	40,41	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.2.02.01.02.01.23	Penyusunan Konten	904.703.109,50							50,74	298.984.840,00	33,05	
	1. Belanja Cetak Baliho	172.806.095,50	172.806.095,50	FRANS GUSTIAN, S.T., M.Si	E-Catalog/E-Purchasing	CV. Sky Printing	17/02/2025	31/12/2025	70	63.470.000,00	36,73	Kecamatan Sekayu
	2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	219.609.635,00		FRANS GUSTIAN, S.T., M.Si	E-Catalog/E-Purchasing				0	0	0	Kecamatan Sekayu
	3. Penyusunan Konten	348.472.529,00		FRANS GUSTIAN, S.T., M.Si	Swakelola				50	71.699.990,00	20,58	Kecamatan Sekayu

KODE	NAMA KEGITAN / SUB KEGIATAN	DANA		NAMA KPA / PPK	METODE PENGADAAN	NAMA PELAKSANA/ REKANAN	MASA PELAKSANAAN KONTRAK/SPK		KEMAJUAN / REALISASI BULAN AGUSTUS			LOKASI
		ANGGARAN (Rp)	NILAI KONTRAK/SPK (Rp)						REALISASI FISIK (%)	PENYERAPAN KEUANGAN		
							MULAI	SELESAI		(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4. Pembayaran Gagal Bayar Tahun Anggaran 2024 Cetak Baliho/Spanduk	122.426.000,00		FRANS GUSTIAN, S.T., M.Si	Swakelola				100	122.426.000,00	100	Kecamatan Sekayu
	5. Pembayaran Gagal Bayar Tahun Anggaran 2024 Pemeliharaan Pemancar Radio	41.388.850,00		FRANS GUSTIAN, S.T., M.Si	Swakelola				100	41.388.850,00	100	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	8.650.449.091,50							73,22	4.541.828.651,00	52,5	
1.16.2.16.18.1.16.3.0.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.650.449.091,50							73,22	4.541.828.651,00	52,5	
1.16.2.16.18.1.16.3.0.2.02.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	253.609.380,00		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				50	36.520.690,00	14,4	Kecamatan Sekayu
1.16.2.16.18.1.16.3.0.2.02.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	8.275.531.711,50							74,27	4.494.994.961,00	54,32	
	1. Belanja Bandwidth Untuk Seluruh Perangkat Daerah	2.832.000.000,00	2.580.000.000,00	DAUD AMRI, S.H	E-Catalog/E-Purchasing	PT. LINTAS JARINGAN NUSANTARA	02/01/2025	31/12/2025	66,66	1.290.000.000,00	45,55	Kecamatan Sekayu
	2. Belanja Jasa Internet Satelit	730.800.000,00	127.390.000,00	DAUD AMRI, S.H	E-Catalog/E-Purchasing	PT. Sinergi Innovate Pratama	07/01/2025	31/12/2025	66,66	73.690.000,00	10,08	Kecamatan Sekayu
	3. Belanja Sewa Jaringan Metro E	2.322.000.000,00	1.944.000.000,00	DAUD AMRI, S.H	E-Catalog/E-Purchasing	PT. INDONESIA COMNETS PLUS	02/01/2025	31/12/2025	66,66	911.857.198,00	39,27	Kecamatan Sekayu
	4. Belanja Lisensi Panel Server	8.769.000,00		DAUD AMRI, S.H	E-Catalog/E-Purchasing				0	0	0	Kecamatan Sekayu
	5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.330.382,00		DAUD AMRI, S.H	E-Catalog/E-Purchasing				0	0	0	Kecamatan Sekayu
	6. Pembayaran Gagal Bayar Tahun Anggaran 2024 Belanja Sewa Jaringan Metro Ethernet untuk Kecamatan dan Kelurahan	670.678.720,00		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				100	670.678.720,00	100	Kecamatan Sekayu
	7. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	81.544.009,50		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				95	73.359.443,00	89,96	Kecamatan Sekayu
	8. Pembayaran Gagal Bayar Tahun Anggaran 2024 Belanja Internet Satelit	341.409.600,00		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				100	341.409.600,00	100	Kecamatan Sekayu
	9. Pembayaran Gagal Bayar Tahun Anggaran 2024 Belanja Jasa Internet Berlangganan (Bandwidth Link 1)	1.134.000.000,00		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				100	1.134.000.000,00	100	Kecamatan Sekayu

KODE	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DANA		NAMA KPA / PPK	METODE PENGADAAN	NAMA PELAKSANA/ REKANAN	MASA PELAKSANAAN KONTRAK/SPK		KEMAJUAN / REALISASI BULAN AGUSTUS			LOKASI
		ANGGARAN (Rp)	NILAI KONTRAK/SPK (Rp)						REALISASI FISIK	PENYERAPAN KEUANGAN		
							MULAI	SELESAI	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.16.2.16.18.1.16.3.0 2.02.02.02.27	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	121.308.000,00		DAUD AMRI, S.H	Swakelola				50	10.313.000,00	8,5	Kecamatan Sekayu
1.20.2.16.18.1.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	766.009.363,30							49,71	242.528.464,00	31,66	
1.20.2.16.18.1.20.2.0 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	766.009.363,30							49,71	242.528.464,00	31,66	
1.20.2.16.18.1.20.2.0 2.01.02.01.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	250.947.863,30		DELA NOVITA SARI, S.T	Swakelola				69,63	118.145.558,00	47,08	Kecamatan Sekayu
	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	152.447.863,30		DELA NOVITA SARI, S.T	Swakelola				50	19.645.558,00	12,89	Kecamatan Sekayu
	2. Pembayaran gagal bayar tahun anggaran 2024 Belanja Komputer dan Tablet	98.500.000,00		DELA NOVITA SARI, S.T	Swakelola				100	98.500.000,00	100	Kecamatan Sekayu
1.20.2.16.18.1.20.2.0 2.01.02.01.08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	327.036.500,00		DELA NOVITA SARI, S.T	Swakelola				40	74.512.406,00	22,78	Luar Kab. Muba
1.20.2.16.18.1.20.2.0 2.01.02.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	154.814.000,00		DELA NOVITA SARI, S.T	Swakelola				40	44.499.200,00	28,74	Kecamatan Sekayu
1.20.2.16.18.1.20.2.0 2.01.02.01.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	33.211.000,00		DELA NOVITA SARI, S.T	Swakelola				40	5.371.300,00	16,17	Kecamatan Sekayu
1.21.2.16.18.1.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.552.730.108,00							55,5	600.573.990,00	38,68	
1.21.2.16.18.1.21.2.0 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.552.730.108,00							55,5	600.573.990,00	38,68	
1.21.2.16.18.1.21.2.0 2.01.02.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	389.678.000,00		Achmad Kartiko Buwono, SE.,M.M	Swakelola				47,91	101.109.300,00	25,95	Kecamatan Sekayu
	1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000,00		Achmad Kartiko Buwono, SE.,M.M	Swakelola				30	1.431.300,00	0,49	Kecamatan Sekayu
	2. Pembayaran gagal bayar tahun anggaran 2024 Belanja Jasa Konsultansi Pendampingan Asesmen Indeks KAMI	99.678.000,00		Jerry Rinoldy, ST.,MT	Swakelola				100	99.678.000,00	100	Kecamatan Sekayu

KODE	NAMA KEGITAN / SUB KEGIATAN	DANA		NAMA KPA / PPK	METODE PENGADAAN	NAMA PELAKSANA/ REKANAN	MASA PELAKSANAAN KONTRAK/SPK		KEMAJUAN / REALISASI BULAN AGUSTUS			LOKASI
		ANGGARAN (Rp)	NILAI KONTRAK/SPK (Rp)						REALISASI FISIK	PENYERAPAN KEUANGAN		
							MULAI	SELESAI		(%)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.21.2.16.18.1.21.2.0 2.01.02.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	825.480.200,50		Achmad Kartiko Buwono, SE.,M.M	Swakelola				69,52	492.504.564,00	59,66	Kecamatan Sekayu
	1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	387.080.200,50		Achmad Kartiko Buwono, SE.,M.M	Swakelola				35	54.104.564,00	13,98	Kecamatan Sekayu
	2. Pembayaran gagal bayar tahun anggaran 2024 Instalasi dan Konfigurasi Server (Web Server/Database Server/DNS Server/Linux Monitoring/Backup Server)	2.800.000,00		Jerry Rinoldy, ST.,MT	Swakelola				100	2.800.000,00	100	Kecamatan Sekayu
	3. Pembayaran gagal bayar tahun anggaran 2024 Sewa VPS	435.600.000,00		Jerry Rinoldy, ST.,MT	Swakelola				100	435.600.000,00	100	Kecamatan Sekayu
1.21.2.16.18.1.21.2.0 2.01.02.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	337.571.907,50		Achmad Kartiko Buwono, SE.,M.M	Swakelola				30	6.960.126,00	2,06	Kecamatan Sekayu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas

Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diwujudkan dengan penetapan indikator kinerja yang akan menjadi landasan bagi Dinkominfo untuk melaksanakan tupoksinya sebagai bagian dari Rencana Strategis Lima Tahunan.

Berdasarkan Permenkominfo Nomor 22/Per/ M. Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Sedangkan untuk IKK, berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri No. 18 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Adapun Indikator kinerja Dinkominfo yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pemerintah Digital (Indeks)
2. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)
3. Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah
4. Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi pada Portal Satu Data

5. Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah
6. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi
7. Persentase masyarakat yang menerima informasi publik

Dalam melaksanakan indikator kinerja tersebut diperlukan pendanaan indikatif agar dalam pengaplikasiannya dapat terwujud. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba melaksanakan beberapa Program dan Kegiatan yang dapat mendukung tercapainya pelaksanan indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Rencana Strategis 2025 – 2029 tertuang dalam capaian Sasaran Strategis tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				REALISASI CAPAIAN	SATUAN	CAPAIAN
		2023	2024	2025	2026	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	3,10	3,23	3,36	3,50	3,62	Indeks	112,0%

NO.	INDIKATOR SASARAN	TARGET				REALISASI CAPAIAN	SATUAN	CATATAN ANALISIS
		2023	2024	2025	2026	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indek SPBE	3,10	3,23	3,36	3,50	3,62	%	112,0%
2.	Persentase Aplikasi/website perangkat Daerah yang Terkoneksi dengan Pusat Data Kabupaten	55	65	75	85	41%	%	63
3.	Persentase Informasi Pemerintah yang disampaikan Kepada Publik	100	100	100	100	100	%	100
4.	Persentase Data Statistik Sektoral	100	100	100	100	100	%	100
5	Persentase Keamanan Informasi pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	%	100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat Daerah

- Tingkat Kinerja PD dan hal Kritis terkait Pelayanan PD

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 dengan realisasinya.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun pun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah tetap mendapatkan atau

menemui berbagai macam persoalan atau hambatan yang sangat krusial dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan informatika menjadi leading sektor SPBE (Sistem pemerintahan berbasis elektronik) yang merupakan indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Banyuasin dengan Capaian Indeks 3,62 atau 112,0 % dari target indeks 3,36 dengan kategori Baik.

Adapun hal kritis terkait pelayanan PD tersebut adalah :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi yang masih belum menyentuh secara menyeluruh pada lapisan masyarakat utamanya bagi yang ada di wilayah pedesaan;
 2. Masih kurangnya sumberdaya manusia pada bidang teknologi informasi yang memiliki kompetensi memadai, baik pada lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dan PD yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin;
 3. Belum optimalnya tingkat keterbukaan informasi publik secara menyeluruh pada wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
 4. Pengelolaan sarana Komunikasi dan informasi masih sangat terbatas dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan tugas Masalah utama yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dalam menjalankan programnya adalah :
1. Kurangnya SDM khususnya pada Tenaga Teknis Komunikasi dan Informatika serta persandian dan statistik;
 2. Pembangunan Teknologi Informasi saat ini belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;

3. Penyelenggaraan pelayanan publik belum memenuhi kepuasan masyarakat baru;
4. Penyebarluasan informasi dan pelayanan publik belum merata di wilayah kabupaten Musi Banyuasin;
5. Pengelolaan Radio dan Televisi masih terbatas baik dari sisi jangkauan siaran maupun kelengkapan sarana dan prasarana.

Hambatan:

1. Pengembangan Aplikasi Informatika secara mandiri dan integrasinya belum optimal
2. Pengelolaan website mubakab.go.id belum optimal
3. Ancaman terhadap jaminan keamanan sistem TI masih tinggi

- Dampak Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah terhadap Program Nasional.

1. Meningkatkan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. (dampak positif)
2. Mengembangkan E-Government/SPBE dalam mewujudkan MUBA SMART CITY. (dampak positif)
3. Mewujudkan Pemerataan Informasi pembangunan Daerah yang akurat, tepat dan cepat kepada Masyarakat melalui Media Komunikasi. (dampak positif)
4. Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional melalui pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

- Tantangan dan Peluang

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dalam pencapaian program prioritas adalah sebagai berikut:

1. Pesatnya perkembangan TIK dengan derasnya arus informasi
2. Perlunya pembaharuan masterplan tentang Smart City dan SPBE/TIK
3. Belum Optimalnya penerapan pemanfaatan TIK internal Pemkab Muba
4. Belum maksimalnya infrastruktur pusat data
5. Luasnya wilayah Kab. Muba
6. Tersebarnya informasi dari PD dilingkungan Pemkab yang dibutuhkan Dinkominfo.

Peluang:

1. Adanya komitmen Pemkab Muba dan semua unsur PD
2. Mewujudkan Muba sebagai Smart Regency
3. Banyaknya pelatihan dan lembaga pendidikan yang mendukung kinerja Kominfo
4. Tersedianya Muba Command Centre sebagai rujukan kebijakan pimpinan
5. Tersedianya media informasi yang dimiliki kominfo (Radio, TV, Call centre 112, website, medsos, wifi public, cctv)
6. Pertumbuhan media cetak dan elektronik yang cukup tinggi
7. Banyaknya perusahaan-perusahaan provider yang berminat untuk menyediakan layanan akses bandwidth.
8. Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kinerja aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
9. Reformasi birokrasi dengan e-government mendukung good and clean governance.

- Formulasi Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan Prioritas tahun yang direncanakan :
 - ✓ Perlu meningkatkan kordinasi antar daerah agar bisa memfasilitasi pengembangan jaringan komunikasi antar daerah yang efektif sebagai infrastruktur dasar dalam menunjang alih pengalaman dan data sumber daya antar daerah di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - ✓ Memperbanyak kuantitas kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia (SDM) agar dapat memenuhi kompetensi yang dibutuhkan (sertifikat dan keterampilan) untuk memperoleh SDM yang ahli bidang TIK, Broadcast, Statistik, Persandian dan Keamanan Informasi;
 - ✓ Meningkatkan jumlah Penelitian dan pengembangan inovasi pelayanan masyarakat di daerah Provinsi, Kabupaten/kota dengan berbasis teknologi informasi;
 - ✓ Pengembangan Penyusunan media informasi berbasis teknologi informasi guna menunjang kegiatan pembangunan dan pengembangan investasi di Kabupaten Musi Banyuasin;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahapan rancangan awal RKPD dimulai dengan usulan program dan kegiatan dari setiap bidang yang ada pada Dinkominfo Muba yang sebelumnya dilakukan rapat pembahasan prioritas terlebih dahulu dengan Kepala Dinas Kominfo dan kemudian usulan tersebut dientry pada aplikasi *sipd-ri.kemendagri.go.id* Kemudian dilakukan pembahasan di Bappeda melalui mitra masing-masing.

Untuk Dinas Kominfo pembahasan dilakukan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah Program kegiatan yang dibahas yaitu

berasal dari Usulan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba, Reses DPRD dan Musrenbang Kecamatan. Saat pembahasan dapat diketahui kegiatan yang prioritas dan penunjang, setelah dilakukan pembahasan Dinas Kominfo mendapatkan Pagu Anggaran dan mulai menyusun RKA dan KAK.

Ada perbedaan antara pagu Rancangan Awal dengan Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025.

- Alasan Proses
Proses terjadinya perbedaan Rancangan Awal dengan hasil Analisis Kebutuhan karena setiap tahap pembahasan anggaran RKPD menyesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah dan pagu yang dialokasikan untuk masing-masing perangkat Daerah.
- Temuan-temuan dan catatan penting setelah proses terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD
 - a. Adanya perubahan rincian belanja yang disesuaikan dengan program dan kegiatan.
 - b. Menyesuaikan dengan Analisis Standar Belanja (ASB) umum dan Standar Satuan Harga (SSH) yang terbaru.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD lebih lanjut dapat dijelaskan pada tabel T-C.31.

TABEL T-C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2025

RANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN											
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI								TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							29.193.362.290,00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							29.193.362.290,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						29.193.362.290,00		2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						29.193.362.290,00			
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						26.992.887.289,00		2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						26.992.887.289,00			
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika	-			100 %	13.104.988.924,99		1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika	-			100 %	13.104.988.924,99			
		Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawalan Tepat Waktu Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 7,91	100 7,91	100 7,91	100 7,91	13.104.988.924,99	-			Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawalan Tepat Waktu Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 7,91	100 7,91	100 7,91	100 7,91	13.104.988.924,99	-		
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sistem perencanaan dan Evaluasi Kinerja berjalan dengan baik	-			11 Laporan	59.930.000,00			2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sistem perencanaan dan Evaluasi Kinerja berjalan dengan baik	-			11 Laporan	59.930.000,00			
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	30.800.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	30.800.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya		
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya		
	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				120 Data	29.130.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				120 Data	29.130.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya		
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Jalannya Administrasi Perkantoran	-			100 %	10.375.731.970,00			2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Jalannya Administrasi Perkantoran	-			100 %	10.375.731.970,00			
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				106 Orang/bulan	10.375.731.970,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				106 Orang/bulan	10.375.731.970,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya		
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas	-			100 %	214.723.480,00			2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas	-			100 %	214.723.480,00			
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	115.071.480,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	115.071.480,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya		
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	99.652.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	99.652.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya		
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelaksananya Aktivitas Kerja dan Perkantoran	-			20 Laporan	809.621.316,00			2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelaksananya Aktivitas Kerja dan Perkantoran	-			20 Laporan	809.621.316,00			
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

RANGKAIAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN									
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI								TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	49.995.232,50	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	49.995.232,50	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2.16.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket			2.16.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	99.811.144,50	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	99.811.144,50	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2.16.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket			2.16.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	59.860.200,99	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	59.860.200,99	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2.16.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket			2.16.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	199.997.258,10	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	199.997.258,10	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2.16.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2 Paket			2.16.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2 Paket		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	101.564.480,71	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	101.564.480,71	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2.16.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material					1 Paket			2.16.01.2.06.0007		Penyediaan Bahan/Material					1 Paket		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	40.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2.16.01.2.06.0008		Facilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan			2.16.01.2.06.0008		Facilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	50.022.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	50.022.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2.16.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan			2.16.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	208.371.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	208.371.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2.16.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya peralatan meubeler penunjang kenyamanan bekerja	-			12 Unit	236.853.017,10		2.16.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya peralatan meubeler penunjang kenyamanan bekerja	-			12 Unit	236.853.017,10	
2.16.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2 Unit			2.16.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2 Unit		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	140.400.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	140.400.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua kelDes
2.16.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel					15 Unit			2.16.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel					15 Unit		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	96.453.017,10	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	96.453.017,10	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2.16.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			25 Laporan	980.407.891,00		2.16.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			25 Laporan	980.407.891,00	
2.16.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2 Laporan			2.16.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2 Laporan		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	427.357.460,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	427.357.460,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2.16.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2 Laporan			2.16.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2 Laporan		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	553.050.431,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	553.050.431,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2.16.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			72 Unit	427.721.250,00		2.16.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			72 Unit	427.721.250,00	
2.16.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					6 Unit			2.16.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					6 Unit		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	249.770.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	249.770.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
		-	-	-	-	-	-	13.184.988.934,90	-			-	-	-	-	-	-	13.184.988.934,90	-
2.16.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit			2.16.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1 Unit		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	123.711.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	123.711.250,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya

RANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN									
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REHISTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REHJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REHJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REHISTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REHJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REHJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI								TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 7,91	100 7,91	100 7,91	100 7,91	13.104.989.924,90 -				Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 7,91	100 7,91	100 7,91	100 7,91	13.104.989.924,90 -	
2.16.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							64 Unit	54.240.000,00	Kab. Musi Banyuwati, Sekayu, Serasan Jaya		2.16.01.2.09.0010						64 Unit	54.240.000,00	Kab. Musi Banyuwati, Sekayu, Serasan Jaya
2. 2.16.82		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah/kabupaten	-			35 %	5.498.578.355,10		2. 2.16.82		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah/kabupaten	-			35 %	5.498.578.355,10	
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik	100	100	100	100	5.498.578.355,10	-			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik	100	100	100	100	5.498.578.355,10	-
2.16.02.2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kab./Muba yang menyampaikan informasi kepada Masyarakat	-			160 Media	5.498.578.355,10		2.16.02.2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kab./Muba yang menyampaikan informasi kepada Masyarakat	-			160 Media	5.498.578.355,10	
2.16.02.2.01.0015		Kemlitran Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																	
		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiskusikan informasi dan terdapat di Dinas Kominfo					10 Komunitas	134.488.850,00	Kab. Musi Banyuwati, Sekayu, Serasan Jaya		2.16.02.2.01.0015		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiskusikan informasi dan terdapat di Dinas Kominfo				10 Komunitas	134.488.850,00	Kab. Musi Banyuwati, Sekayu, Serasan Jaya
2.16.02.2.01.0016		Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																	
		Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika					2 Laporan	165.346.000,00	Kab. Musi Banyuwati, Sekayu, Serasan Jaya		2.16.02.2.01.0016		Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				2 Laporan	165.346.000,00	Kab. Musi Banyuwati, Sekayu, Serasan Jaya
2.16.02.2.01.0019		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																	
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah					3 Rekomendasi	405.022.650,00	Kab. Musi Banyuwati, Sekayu, Serasan Jaya		2.16.02.2.01.0019		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				3 Rekomendasi	405.022.650,00	Kab. Musi Banyuwati, Sekayu, Serasan Jaya
2.16.02.2.01.0021		Pengelolaan Media Komunikasi Publik																	
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai keterjangkauan					150 Media	2.966.000.000,00	Kab. Musi Banyuwati, Sekayu, Serasan Jaya		2.16.02.2.01.0021		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai keterjangkauan				150 Media	2.966.000.000,00	Kab. Musi Banyuwati, Sekayu, Serasan Jaya
2.16.02.2.01.0022		Penyusunan Strategi Komunikasi Publik																	
		Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun					200 Dokumen	1.083.463.724,10	Kab. Musi Banyuwati, Sekayu, Serasan Jaya		2.16.02.2.01.0022		Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				200 Dokumen	1.083.463.724,10	Kab. Musi Banyuwati, Sekayu, Serasan Jaya
2.16.02.2.01.0023		Penyusunan Konten																	
		Jumlah Konten Informasi Publik					3 Konten	944.257.131,00	Kab. Musi Banyuwati, Sekayu, Serasan Jaya		2.16.02.2.01.0023		Jumlah Konten Informasi Publik				3 Konten	944.257.131,00	Kab. Musi Banyuwati, Sekayu, Serasan Jaya
3. 2.16.83		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE Indeks Masyarakat Digital Indonesia	-			3,8 Indeks 45,37 Indeks	8.889.308.898,00		3. 2.16.83		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE Indeks Masyarakat Digital Indonesia	-			3,8 Indeks 45,37 Indeks	8.889.308.898,00	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	100	100	100	100	8.889.308.898,00	-			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	100	100	100	100	8.889.308.898,00	-
2.16.03.2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
		Tertataannya Pelayanan Pemerintah dan Masyarakat melalui Teknologi Informatika					100 %	8.089.300.000,00		2.16.03.2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tertataannya Pelayanan Pemerintah dan Masyarakat melalui Teknologi Informatika	-			100 %	8.089.300.000,00	
2.16.03.2.02.0024		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																	
										2.16.03.2.02.0024									

RANGKAIAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN									
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRICA OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRICA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RESTRICA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRICA OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRICA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RESTRICA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI								TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kabupaten yang terhubung dengan Jaringan Data Pemerintah Daerah Kabupaten				48 Perangkat Daerah	7.419.021.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kabupaten yang terhubung dengan Jaringan Data Pemerintah Daerah Kabupaten				48 Perangkat Daerah	7.419.021.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tela kela SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah										2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tela kela SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah									
			Jumlah dokumen kebijakan tela kela SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	466.798.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah dokumen kebijakan tela kela SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	466.798.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas										2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas									
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	204.481.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	204.481.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2.28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						356.495.000,00		2.28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						356.495.000,00	
1.	2.28.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi pada Portal Satu Data Muba	-			100 % 40 %	356.495.000,00		1.	2.28.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi pada Portal Satu Data Muba	-			100 % 40 %	356.495.000,00	
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral	100	100	100	100	356.495.000,00	-			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral	100	100	100	100	356.495.000,00	-
2.20.02.2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakekan	-			1 Dokumen	356.495.000,00		2.20.02.2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakekan	-			1 Dokumen	356.495.000,00	
2.20.02.2.01.0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional										2.20.02.2.01.0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional									
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				100 %	148.865.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				100 %	148.865.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2.20.02.2.01.0020 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral										2.20.02.2.01.0020 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral									
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				50 Orang	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				50 Orang	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2.20.02.2.01.0021 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar										2.20.02.2.01.0021 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar									
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				100 %	207.630.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				100 %	207.630.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAH						2.854.800.800,00		2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAH						2.854.800.800,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAH UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat kemandangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Kab. Muba	-			78 %	2.854.800.800,00		1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAH UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat kemandangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Kab. Muba	-			78 %	2.854.800.800,00	
		Meningkatnya keamanan siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah	100	100	100	100	2.854.800.800,00	-			Meningkatnya keamanan siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah	100	100	100	100	2.854.800.800,00	-
2.21.02.2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemkab Muba	-			100 %	2.054.000.000,00		2.21.02.2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemkab Muba	-			100 %	2.054.000.000,00	
2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik										2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	437.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	437.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2.21.02.2.01.0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan										2.21.02.2.01.0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				1 Laporan	291.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				1 Laporan	291.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah										2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				48 Perangkat Daerah	1.326.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				48 Perangkat Daerah	1.326.000.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya
J U M L A H								29.193.362.286,00		J U M L A H								29.193.362.286,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan –usulan program dan kegiatan masyarakat, baik disampaikan secara langsung melalui Musrenbang, maupun melalui reses DPRD.

Usulan dari Masyarakat yang masuk dalam Musrenbang yang disetujui dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dibahas pada forum PD, Musrenbang dan ratek sehingga yang rapat tertulis disahkan menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026.

usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lebih lanjut dijelaskan pada Tabel T-C.32

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berikut ini usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan yaitu :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Musi Banyuasin

No	Usulan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	-				
2	-				
3	-				
4	-				
5	-				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke Daerah. Bidang komunikasi dan informatika teramat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informatika masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan terus digalakkan.

Tabel 3.1
Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas kabupaten
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) (PN 1)		
2	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta megembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (PN 3)	Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan sentra produksi dan pusat pertumbuhan serta pemerataan pembangunan sampai ke desa yang berwawasan lingkungan
3	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas (PN 4)	Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas;	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
4	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (PN 5)	Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk	Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan serta digitalisasi usaha ekonomi untuk memperkuat pasar

		Meningkatkan pendapatan masyarakat;	
5	Memantapkan Sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.(PN 2)	Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru	
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.(PN 6)	Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan;	Menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pengurangan beban dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. (PN 7)	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif Berorientasi pada Pelayanan Publik
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (PN 8)	Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal.	

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

3.2.1 TUJUAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis 2025 – 2029 adalah :

- Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital, Terwujudnya Layanan Statistik yang akurat dan dapat diandalkan, Meningkatnya Keamanan Informasi

3.2.2 SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba tahun 2026 adalah :

- Meningkatnya efektivitas birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan Program dan Kegiatan Dinkominfo yang ada dalam Rencana Kerja Tahun 2026 disusun berdasarkan Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah 2025-2030 serta Peningkatan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo Kab. Muba.

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

berjumlah 5 Program, 11 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar Rp. 27.103.362.280,00,-

a. Faktor yang dipertimbangkan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dikaitkan dengan program prioritas Dinkominfo

b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan

Pada tahun perencanaan 2026 ada Lima (5) program, sebelas (11) kegiatan dan 34 Sub kegiatan dengan total pagu Rp. 27.103.362.280,00,- Penyebaran lokasi sub kegiatan di Kabupaten Musi Banyuasin.

- c. Penjelasan jika rumusan Program dan kegiatan tidak sesuai dengan rencana awal RKPD

Untuk perencanaan tahun 2026 rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan rencana awal RKPD ditinjau dari jenis program/kegiatan dan atau pagu indikatif.

TABEL T-C.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH 2026 DAN PERKIRAAN MAJU 2027
TAHUN PERENCANAAN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.18.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						28.103.362.280,00							32.280.400.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						28.103.362.280,00							32.280.400.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						26.692.887.280,00							29.475.400.000,00	
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Kebutuhan Pemungutan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika				100 %	13.104.888.924,90						-	10.186.400.000,00	
		[Terpenuhinya Kebutuhan Pemungutan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika]	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 7,01	100 7,01	100 7,01	100 7,01	13.104.888.924,90	-	-	-	-	-	-	10.186.400.000,00	-
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sistem perencanaan dan Evaluasi Kinerja berjalan dengan baik				11 Laporan	50.930.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas	PO6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5 Tasi Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Diskorontalo	-	105.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Musi Banyuwangi, Sekayu, Sarasin Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas	PO6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5 Tasi Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Diskorontalo	-	95.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	0,00	Kab. Musi Banyuwangi, Sekayu, Sarasin Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas	PO6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5 Tasi Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Diskorontalo	-	45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sekelompok Daerah	Jumlah Data Statistik Sekelompok Daerah yang Telah Ditumpulkan dan Diposkan Linkup Perangkat Daerah				120 Data	29.130.000,00	Kab. Musi Banyuwangi, Sekayu, Sarasin Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas	PO6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5 Tasi Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Diskorontalo	-	55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJIA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.16.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertetapkannya kebijakan Administrasi Perimbangan	-			100 %	10.375.731.970,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PD6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5 Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik).	Seluruh Pegawai Disikornito	-	5.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0001		Penyerahan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100	10.375.731.970,00	Kab. Musi Banyuwasin, Sekeloa, Serasan Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PD6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5 Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik).	Seluruh Pegawai Disikornito	-	5.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah	-			100 %	214.723.480,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PD6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5 Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik).	Seluruh Pegawai Disikornito	-	295.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Abjad Kelingkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Abjad Kelingkapannya				1 Paket	115.071.480,00	Kab. Musi Banyuwasin, Sekeloa, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PD6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5 Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik).	Seluruh Pegawai Disikornito	-	140.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	80.652.000,00	Kab. Musi Banyuwasin, Sekeloa, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PD6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5 Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik).	Seluruh Pegawai Disikornito	-	155.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelancaran Aktivitas Kerja dan Perekonomian	-			20 Laporan	859.621.310,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PD6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5 Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik).	Seluruh Pegawai Disikornito	-	1.305.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penyalangan Bangunan Kantor														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kesehatan Temu				1 Laporan	50.022.000,00	Kab. Muar Banyuwangi, Sekeloa, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesejahteraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PO6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapabilitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05 Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Diskominfo		55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	208.371.000,00	Kab. Muar Banyuwangi, Sekeloa, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesejahteraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PO6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapabilitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05 Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Diskominfo		360.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya peralatan komputer penunjang kenyamanan bekerja					12 Unit	276.853.017,10			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesejahteraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PO6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapabilitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05 Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Diskominfo		350.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disiapkan					2 Unit	140.400.000,00	Kab. Muar Banyuwangi, Sekeloa, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesejahteraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PO6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapabilitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05 Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Diskominfo		140.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Peralit Mebel yang Disiapkan					15 Unit	90.453.017,10	Kab. Muar Banyuwangi, Sekeloa, Serasan Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesejahteraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PO6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapabilitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05 Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Diskominfo		210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25 Laporan	980.407.897,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesejahteraan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PO6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapabilitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05 Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Seluruh Pegawai Diskominfo		1.820.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Lahan yang Dihasilkan	-	-	-	2 Laporan	427.551.480,00	Kab. Muar Banyuwangi, Selatun, Sragen Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan prestasi sebagai keistimewaan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PDB: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5) Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik.	Sekolah Pegawai Diskominfo	-	450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan	-	-	-	2 Laporan	553.050.431,00	Kab. Muar Banyuwangi, Selatun, Sragen Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan prestasi sebagai keistimewaan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PDB: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5) Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik.	Sekolah Pegawai Diskominfo	-	1.370.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09	Pemerintahan Barang Milik Daerah Penunjang Utama Pemerintahan Daerah	Tepelharaher sarana dan Prasarana Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan	-	-	-	72 Unit	427.721.250,00	Kab. Muar Banyuwangi, Selatun, Sragen Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan prestasi sebagai keistimewaan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PDB: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5) Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik.	Sekolah Pegawai Diskominfo	-	750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ektes Pemeliharaan, Pajak dan Potensi Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan	-	-	-	8 Unit	349.770.000,00	Kab. Muar Banyuwangi, Selatun, Sragen Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan prestasi sebagai keistimewaan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PDB: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5) Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik.	Sekolah Pegawai Diskominfo	-	545.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0009		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan	-	-	-	1 Unit	123.711.250,00	Kab. Muar Banyuwangi, Selatun, Sragen Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan prestasi sebagai keistimewaan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PDB: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5) Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik.	Sekolah Pegawai Diskominfo	-	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0010		[Terpenuhi] Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan	-	-	-	1 Unit	123.711.250,00	Kab. Muar Banyuwangi, Selatun, Sragen Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan prestasi sebagai keistimewaan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PDB: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5) Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik.	Sekolah Pegawai Diskominfo	-	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0011		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan	-	-	-	1 Unit	123.711.250,00	Kab. Muar Banyuwangi, Selatun, Sragen Jaya	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan prestasi sebagai keistimewaan gender serta penguatan peran perempuan pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PDB: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5) Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik.	Sekolah Pegawai Diskominfo	-	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MALU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Strategi komunikasi Publik yang disusun				200 Dokumen	1.033.483.724,10	Kab. Musi Banyuwasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender serta penguatan peran perempuan/pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PDG: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5) Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik.	Seluruh Masyarakat Kabupaten Musi Banyuwasin		1.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0023		Penyusunan Konten	Jumlah Konten layanan Publik				3 Konten	844.257.131,00	Kab. Musi Banyuwasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender serta penguatan peran perempuan/pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PDG: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5) Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik.	Seluruh Masyarakat Kabupaten Musi Banyuwasin		1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE Indeks Masyarakat Digital Indonesia	-			3,8 Indeks 45,27 Indeks	8.089.300.000,00						-	10.110.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika]	Persentase aplikasi website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	100	100	100	100	8.089.300.000,00						-	10.110.000.000,00	
2.16.03.2.02		Pengelolaan E-government & Lintas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru	Tertelaksananya Pelayanan Pemerintah dan Masyarakat melalui Teknologi Informatika				100 %	9.055.300.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender serta penguatan peran perempuan/pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PDG: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5) Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik.	Seluruh Masyarakat Daerah di Kabupaten Musi Banyuwasin		10.110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0004		Peningkatan layanan informasi Pemerintah Daerah Kotabaru	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kabupaten yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru			48 Perangkat Daerah	7.418.021.000,00		Kab. Musi Banyuwasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender serta penguatan peran perempuan/pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PDG: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5) Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik.	Seluruh Masyarakat Daerah di Kabupaten Musi Banyuwasin		9.325.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0007		Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintahan Daerah			1 Dokumen	456.798.000,00		Kab. Musi Banyuwasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender serta penguatan peran perempuan/pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PDG: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5) Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik.	Seluruh Masyarakat Daerah di Kabupaten Musi Banyuwasin		513.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0008		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten Kota Cerdas			1 Dokumen	204.461.000,00		Kab. Musi Banyuwasin, Sekayu, Serasan Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender serta penguatan peran perempuan/pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	PDG: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas (5) Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik.	Seluruh Masyarakat Daerah di Kabupaten Musi Banyuwasin		245.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						366.495.000,00							910.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MALU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGULUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi pada Portal Satu Data Muba	-	-	-	100 % 40 %	356.496.000,00	-	-	-	-	-	-	970.000.000,00	-
		[Indeks Pembangunan Statistik (IPS)]	Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral	100	100	100	100	356.496.000,00	-	-	-	-	-	-	970.000.000,00	-
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terdapatnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diandalkan yang dihasilkan serta mudah diakses dan dibagi pakekan	-	-	1 Dokumen	-	356.496.000,00	-	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas	PD6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemerataan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05 Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin	-	970.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0017	Pengicaraan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pemba data statistik	-	-	100 %	-	148.995.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serawai Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas	PD6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemerataan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05 Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin	-	405.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0020	Pengicaraan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang menempati pelatikan di bidang statistik	-	-	50 Orang	-	0,00	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serawai Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas	PD6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemerataan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05 Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin	-	395.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0021	Peleaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang diunggah dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	-	-	100 %	-	207.630.000,00	Kab. Musi Banyuasin, Selayu, Serawai Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas	PD6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemerataan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05 Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin	-	220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2.21.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Persentase Tingkat ketahanan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Kab. Muba	-	-	-	70 %	2.064.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.816.000.000,00	-
		[Meningkatnya keamanan siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah]	Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah	100	100	100	100	2.064.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.816.000.000,00	-
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemkab Muba	-	-	100 %	-	2.054.000.000,00	-	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, ketahanan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas	PD6: Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemerataan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05 Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin	-	1.816.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0005	Peleaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGULUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	437.000.000,00	Kab. Musi Banyuwati, Sekeloa, Serasan Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	POK - Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuwati		880.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.21.02.2.01.0006		Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Penguatan Pemerintahan Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Penguatan Pemerintahan Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				1 Laporan	291.000.000,00	Kab. Musi Banyuwati, Sekeloa, Serasan Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	POK - Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuwati		475.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.21.02.2.01.0007		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Penguatan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Penguatan				48 Perangkat Daerah	1.325.000.000,00	Kab. Musi Banyuwati, Sekeloa, Serasan Jaya	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda/generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	POK - Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas 05. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan efektif berorientasi pada Pelayanan Publik	Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Banyuwati		460.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
JUMLAH								29.103.382.280,00								32.286.400.000,00	

BAB IV
TABEL T-C 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun anggaran 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			29.103.362.280,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			29.103.362.280,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			26.692.867.280,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika	13.104.988.924,90
Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan akuntabel Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu Persentase pemenuhan layanan keuangan dan administrasi perkantoran Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	13.104.988.924,90
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Sistem perencanaan dan Evaluasi Kinerja berjalan dengan baik	59.930.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.800.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	29.130.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya kelancaran Administrasi Perkantoran	10.375.731.970,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10.375.731.970,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dinas	214.723.480,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	115.071.480,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	99.652.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kelancaran Aktivitas Kerja dan Perkantoran	809.621.316,80
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	49.995.232,50
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	99.811.144,50
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	59.860.200,99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	199.997.258,10
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	101.564.480,71
	Penyediaan Bahan/Material		
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40.000.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.022.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.371.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya peralatan meubeler penunjang kenyamanan bekerja	236.853.017,10
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	140.400.000,00
	Pengadaan Mebel		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	96.453.017,10
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	980.407.891,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	427.357.460,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	553.050.431,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya sarana dan Prasarana Penunjang urusan Pemerintah Daerah	427.721.250,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	249.770.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	123.711.250,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54.240.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	5.498.578.355,10
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik Pemerintah Daerah		Persentase informasi pemerintahan yang disampaikan kepada publik	5.498.578.355,10
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Media Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kab,MUba yang menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat	5.498.578.355,10

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		
		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	134.488.850,00
	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
		Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	165.346.000,00
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	405.022.650,00
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/fuknis	2.866.000.000,00
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik		
		Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1.083.463.724,10
	Penyusunan Konten		
		Jumlah Konten Informasi Publik	844.257.131,00
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Indeks SPBE Indeks Masyarakat Digital Indonesia	8.089.300.000,00
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Persentase aplikasi/website perangkat daerah yang terkoneksi dengan pusat data kabupaten	8.089.300.000,00
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pelayanan Pemerintah dan Masyarakat melalui Teknologi Informatika	8.089.300.000,00
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		
		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	7.418.021.000,00
	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		
		Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	466.798.000,00
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		
		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	204.481.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			356.495.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi pada Portal Satu Data Muba	356.495.000,00
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		Persentase ketersediaan data Statistik Sektoral	356.495.000,00
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan.	356.495.000,00
	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional		

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4
		<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik</i>	148.865.000,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		
		<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</i>	0,00
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		
		<i>Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral</i>	207.630.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			2.054.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		<i>Persentase Tingkat kematangan Keamana Siber dan Sandi Pemerintah Kab. Muba</i>	2.054.000.000,00
Meningkatnya keamanan siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		<i>Persentase keamanan informasi Pemerintah Daerah</i>	2.054.000.000,00
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemkab Muba</i>	2.054.000.000,00
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
		<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	437.000.000,00
	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan		
		<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan</i>	291.000.000,00
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		
		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian</i>	1.326.000.000,00
Total			29.103.362.280,00

TABEL T-C 4.2
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2026

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun + 1
								Tahun - 1	Tahun N				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
Dinas Komunikasi dan Informatika													
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Rp. 5.250.148.529,00	Rp. 248.429.826,10	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.498.578.355,10	Rp. 9.180.000.000,00
2	16	02	2		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 5.250.148.529,00	Rp. 248.429.826,10	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.498.578.355,10	Rp. 9.180.000.000,00
2	16	02	2	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 134.488.850,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 134.488.850,00	Rp. 155.000.000,00
2	16	02	2	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 165.346.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 165.346.000,00	Rp. 355.000.000,00
2	16	02	2	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 405.022.650,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 405.022.650,00	Rp. 505.000.000,00
2	16	02	2	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.866.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.866.000.000,00	Rp. 5.565.000.000,00
2	16	02	2	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 898.100.000,00	Rp. 185.363.724,10	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.083.463.724,10	Rp. 1.100.000.000,00
2	16	02	2	0023	Penyusunan Konten	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 781.191.029,00	Rp. 63.066.102,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 844.257.131,00	Rp. 1.500.000.000,00
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			Rp. 7.865.212.922,50	Rp. 224.087.077,50	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 8.089.300.000,00	Rp. 10.110.000.000,00
2	16	03	2		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 7.865.212.922,50	Rp. 224.087.077,50	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 8.089.300.000,00	Rp. 10.110.000.000,00
2	16	03	2	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 7.193.933.922,50	Rp. 224.087.077,50	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.418.021.000,00	Rp. 9.355.000.000,00
2	16	03	2	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 466.798.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 466.798.000,00	Rp. 510.000.000,00
2	16	03	2	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 204.481.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 204.481.000,00	Rp. 245.000.000,00
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 12.848.864.562,31	Rp. 256.124.362,59	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.104.988.924,90	Rp. 10.140.400.000,00
2	16	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 59.930.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 59.930.000,00	Rp. 120.000.000,00
2	16	01	2	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 30.800.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.800.000,00	Rp. 65.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Tahun + 1
Dinas Komunikasi dan Informatika														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	01	2	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.130.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 29.130.000,00	Rp. 55.000.000,00
2	16	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 10.375.731.970,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 10.375.731.970,00	Rp. 5.500.000.000,00
2	16	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.375.731.970,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.375.731.970,00	Rp. 5.500.000.000,00
2	16	01	2		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				Rp. 214.723.480,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 214.723.480,00	Rp. 295.000.000,00
2	16	01	2	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 115.071.480,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 115.071.480,00	Rp. 140.000.000,00
2	16	01	2	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 99.652.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 99.652.000,00	Rp. 155.000.000,00
2	16	01	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 649.949.971,31	Rp. 159.671.345,49	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 809.621.316,80	Rp. 1.305.000.000,00
2	16	01	2	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 49.995.232,50	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 49.995.232,50	Rp. 55.000.000,00
2	16	01	2	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 99.811.144,50	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 99.811.144,50	Rp. 310.000.000,00
2	16	01	2	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 59.860.200,99	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 59.860.200,99	Rp. 100.000.000,00
2	16	01	2	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 199.997.258,10	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 199.997.258,10	Rp. 210.000.000,00
2	16	01	2	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 101.564.480,71	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 101.564.480,71	Rp. 160.000.000,00
2	16	01	2	0007	Penyediaan Bahan/Material	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 40.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 40.000.000,00	Rp. 55.000.000,00
2	16	01	2	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.022.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.022.000,00	Rp. 55.000.000,00
2	16	01	2	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 208.371.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 208.371.000,00	Rp. 360.000.000,00
2	16	01	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 140.400.000,00	Rp. 96.453.017,10	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 236.853.017,10	Rp. 350.400.000,00
2	16	01	2	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 140.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 140.400.000,00	Rp. 140.400.000,00
2	16	01	2	0005	Pengadaan Mebel	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 96.453.017,10	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 96.453.017,10	Rp. 210.000.000,00
2	16	01	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 980.407.891,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 980.407.891,00	Rp. 1.820.000.000,00
2	16	01	2	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 427.357.460,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 427.357.460,00	Rp. 450.000.000,00
2	16	01	2	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 553.050.431,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 553.050.431,00	Rp. 1.370.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Tahun + 1
Dinas Komunikasi dan Informatika														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	01	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 427.721.250,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 427.721.250,00	Rp. 750.000.000,00
2	16	01	2	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 249.770.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 249.770.000,00	Rp. 545.000.000,00
2	16	01	2	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 123.711.250,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 123.711.250,00	Rp. 150.000.000,00
2	16	01	2	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pajak Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 54.240.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 54.240.000,00	Rp. 55.000.000,00
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				Rp. 356.495.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 356.495.000,00	Rp. 685.000.000,00
2	20	02	2		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 356.495.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 356.495.000,00	Rp. 685.000.000,00
2	20	02	2	0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 148.865.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 148.865.000,00	Rp. 465.000.000,00
2	20	02	2	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 207.630.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 207.630.000,00	Rp. 220.000.000,00
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				Rp. 883.803.622,19	Rp. 1.170.196.377,81	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.054.000.000,00	Rp. 1.815.000.000,00
2	21	02	2		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 883.803.622,19	Rp. 1.170.196.377,81	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.054.000.000,00	Rp. 1.815.000.000,00
2	21	02	2	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 350.993.870,00	Rp. 86.006.130,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 437.000.000,00	Rp. 880.000.000,00
2	21	02	2	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 291.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 291.000.000,00	Rp. 475.000.000,00
2	21	02	2	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 241.809.752,19	Rp. 1.084.190.247,81	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.326.000.000,00	Rp. 460.000.000,00
Jumlah									Rp. 27.204.524.836,00	Rp. 1.898.837.644,00			Rp. 29.103.362.280,00	Rp. 31.930.400.000,00

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rencana kerja dibuat terkait dengan Tujuan Sasaran Pemerintah Daerah untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan PD untuk mencapai target IKU kabupaten yaitu

- Indeks Pemerintah Digital
- Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

yang dalam hal ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Tetapi dalam pelaksanaan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini juga merupakan salah satu bentuk Pengevaluasian hasil program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin selama Tahun Anggaran 2025, dan sebagai tolak ukur rencana capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 1 (satu) tahun ke depan 2026.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin yang berisi prioritas program dan kegiatan, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2026.

**Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



DAUD AMRI, S.H
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19751229 200312 1 005